



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6458-6469

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah dalam Peningkatan PAD dan Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan

Astuti Suparno^{1✉}, Chairullah Amin², Abdul Chalid Ahmad³

Universitas Khairun

Email: astutisuparno17@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Menurut standar akuntansi publik, aset adalah cadangan keuangan yang telah disisihkan atau diperoleh pemerintah berdasarkan proyek-proyek masa lalu yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. dapat dikonversi menjadi uang dengan cara apa pun. Hal ini mencakup cagar alam yang tidak tergantung yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada publik, dan cagar alam yang dibatasi karena keyakinan agama atau budaya. Menurut standar akuntansi publik, aset adalah cadangan keuangan yang telah disisihkan atau diperoleh pemerintah berdasarkan proyek-proyek masa lalu yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. dapat dikonversi menjadi uang dengan cara apa pun. Hal ini mencakup cagar alam yang tidak tergantung yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada publik, dan cagar alam yang dibatasi karena keyakinan agama atau budaya..enurut Standar Akuntansi Pemerintah, aset adalah cadangan ekonomi yang telah disisihkan atau diperoleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diantisipasi bahwa manfaat dari ekonomi dan masyarakat akan bertambah baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum, serta dapat dikonversi ke dalam satu atau lain bentuk menjadi mata uang. Ini termasuk cadangan non-fungible yang diperlukan untuk penyediaan layanan kepada masyarakat umum serta dana cadangan yang tunduk pada pembatasan karena keyakinan agama dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah dalam kaitannya dengan PAD Kota Tidore Kepulauan. (2). Menganalisis ambang batas efisiensi/ketidakmampuan untuk setiap SKPD saat menggunakan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data orde kedua sebagai data primer, dan data orde primer sebagai data sekunder. Sumber data diperoleh dari database atau sumber lainnya yang terkait, khususnya, BPS dan Bank Negara Malaysia Dan Aset Kota Tidore Kelantan. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan statistik non-parametrik untuk menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk memperkirakan efisiensi pemanfaatan Aset sehubungan dengan

pertumbuhan pendapatan asli di wilayah Tidore Kepulauan. Input dan output data dari Unit Pengambilan Keputusan (DMU) satu organisasi dibandingkan dengan input dan output DMU lain yang berbeda menggunakan metode Analisis Penyelubungan Data (DEA). Output penggunaan Kinerja Pemanfaatan Aset Kota Tidore Kepulauan untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat dinas dalam lima tahun terakhir dengan skor efisiensi satu. Dinas yang disebutkan di atas yang memiliki kinerja pemanfaatan aset dapat dikatakan efisien tanah pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Perkim dan Dinas Pertanian, sementara peralatan dan mesin pada Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian, untuk gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian, sementara jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian. Mengenai total aset Kota Tidore Kepulauan di SKPD yang dapat digambarkan agak tidak efisien, lihat Dinas Pekerjaan Umum.

Kata Kunci: *Aset, Efisiensi, DEA*

Abstract

Based on Government Accounting Standards, assets are economic resources controlled or owned by the government as a result of past events and from which future economic and social benefits are expected to be obtained, both by the government and the community, and can be measured in monetary units, including non-financial resources needed to provide services to the general public and resources maintained for historical and cultural reasons. The objectives of this study are: (1). To analyze the Performance of Regional Asset Utilization towards increasing the PAD of Tidore Islands City (2). To analyze the level of efficiency/inefficiency in each SKPD in the use of Regional Assets of Tidore Islands City. The type of data in this study is secondary data as the main data, while primary data complements secondary data. Data sources were obtained from related agencies or institutions, namely BPS and the Financial and Regional Asset Management Agency of Tidore Islands City. This study uses a quantitative model with non-parametric statistics in calculating Data Envelopment Analysis (DEA) to measure the level of efficiency of Asset utilization towards increasing the original regional income of Tidore Islands City. The Data Envelopment Analysis (DEA) method is to compare input data and output data from a DMU (Decision Making Units) data organization with other input and output data in similar DMUs. The output of the use of Tidore Islands City Asset Utilization Performance for processing results shows that there are 4 agencies in the last five years that have an efficiency score of 1. The four agencies that have asset utilization performance can be said to be efficient, namely land in the Health Agency, Education Agency, PU Agency, Perkim Agency and Agriculture Agency while equipment and machinery in the Health Agency, Education Agency, PU Agency, PERKIM Agency and Agriculture Agency, for buildings and structures in the Health Agency, Education Agency, PU Agency, PERKIM Agency and Agriculture Agency, while irrigation roads and networks in the Health Agency, Education Agency, PERKIM Agency and Agriculture Agency. For the total assets of Tidore Islands City in SKPD which can be said to be less efficient, namely in the Public Works Agency..

Keywords: *Assets, Efficiency, DEA*

PENDAHULUAN

Gagasan penerapan pemerintahan sendiri daerah berangkat dari gagasan memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai rakyat dalam praktik penegakan pemerintah daerah. Pada masa rezim baru, harapan pembangunan daerah tidak lagi dimaksimalkan berdasarkan kompetensi dan kemauan daerah itu sendiri, sementara dominasi pemerintah pusat atas daerah dianggap membunuh inisiatif dan kreativitas daerah karena ketidakfleksibelan yang diberikan kepada daerah untuk menentukan kebijakan teritorialnya sendiri. Kewenangan yang diberikan di wilayah tersebut tidak disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional dan pendanaan yang adil. Hasilnya adalah alih-alih menciptakan kemandirian daerah, ketergantungan daerah pada pemerintah pusat terlalu besar. Noviawati, (2016)

Di sisi lain, selama periode pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus melakukan perubahan substansial dalam pengelolaan daerahnya, dengan potensi ekonomi salah satunya. Potensi ekonomi, manfaat finansial, dan ekonomi masa depan dapat diperoleh untuk mendukung peran dan peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, salah satunya harus mampu mengelola aset yang dimilikinya. Tata kelola sumber daya daerah yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Pada akhirnya, akan berdampak pada peningkatan pendapatan domestik riil, sebagai sumber pembiayaan domestik. Berbeda dengan aset daerah yang tidak dikelola dan digunakan secara optimal, akan menyia-nyiaikan keuangan daerah. Sumber daya daerah harus dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kontribusi dapat diberikan kepada daerah. (Feijar & Priyono, 2023).

Serta (Raharja, Pratiwi, & Wachid, 2015) Penelitian tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah (studi tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Lamongan) di mana sumber daya manusia berkualitas buruk ditemukan menjadi salah satu kendala kemampuan melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik. Sumber daya manusia yang masih hilang tidak hanya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset (BPCAD) Kabupaten Lamongan, tetapi juga di masing-masing Unit Usaha Daerah Perangkat Keras (SKPD)

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan di industri penyiaran, yang tidak dilakukan dengan DEA. Penelitian menggunakan DEA banyak dilakukan pada perusahaan yang beroperasi di industri perbankan, salah satunya dilakukan oleh (Binuko et al., 2017) dan Alam (2010), Sfinga dan Demetrix (2011), Firdaus dan Hossen (2013), dan penelitian yang dilakukan

di industri manufaktur, dilakukan oleh Abri dan Mahmoudzadeh (2014). Apalagi di industri pertanian dan peternakan (Binuko, 2017)

Oleh karena itu, studi yang dilakukan oleh Aira (2014) menyoroti pentingnya pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan aset dengan cara yang menghormati. Dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah daerah harus memanfaatkan kontribusi optimal aset terhadap kesejahteraan daerah sehingga pembangunan Aset Daerah Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan diimplementasikan secara efektif. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan strategi berikut: penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Kesulitan dalam mengelola portofolio aset selama proses implementasi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti manajemen persediaan, audit hukum, penilaian aset, dan optimalisasi aset untuk digunakan. Namun, jika pemerintah daerah sudah mengakui hal tersebut, maka akan ada peluang agar aset tersebut di atas dapat dimanfaatkan dengan lebih mudah dan efisien. kemampuan entitas untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten. Yang penting, pendekatan pengelolaan aset ini membuat setiap anggota SKPD lebih waspada dan efisien dalam meluncurkan dan memanfaatkan kegiatan aset. Hal ini dikarenakan efisiensi merupakan salah satu prinsip panduan dalam melaksanakan program pemerintahan daerah. Pada tahun 2017 Pauweni dkk.

Kekayaan daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan daerah. Itulah mengapa penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset dengan baik. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan dalam kebutuhan perencanaan dan aspek penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, penggunaan, penggunaan, administrasi, penggunaan atau penggunaan, keamanan dan pemeliharaan, penilaian, eliminasi, transfer, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, persyaratan kredit dan kompensasi untuk memungkinkan pemerintah daerah memberikan yang terbaik dalam hal pengembangan aset daerah untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintah daerah memberikan yang terbaik kepada pemerintah daerah untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintah daerah untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan yang terbaik kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan yang terbaik bagi pertanian. (Hasan, 2012)

Maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah terhadap peningkatan PAD Kota Tidore Kepulauan dan Untuk mengetahui tingkat

efisiensi/inefisiensi pada masing-masing SKPD dalam penggunaan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran dalam Syamasuddin, 2011). Alasan penggunaan data orde kedua adalah karena memiliki validitas yang diverifikasi oleh pihak lain, sehingga cocok digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data deret waktu periode 2019-2023, sehingga hasil analisis merupakan fungsi dari penggunaan titik data deret waktu. Sumber data berasal dari instansi atau organisasi terkait, khususnya BPS dan Sharing, penelitian ini memperkirakan efektivitas penggunaan aset relatif terhadap perkembangan pendapatan asli di wilayah Kepulauan Tidore menggunakan data enclosure analysis (DEA) menggunakan model kuantitatif dengan statistik non-parametrik. Pengumpulan data dilakukan melalui periode keuangan konsolidasi tahun buku 2019-2023 dan tahun buku 2019-2023 oleh Kantor Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Teknik analisis pengembangan data (DEA) adalah membandingkan data input dan output organisasi data DMU (Decision Making Units) dengan data input dan output lainnya dalam DMU yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan nilai efisiensi (Effendi, 2011). Selain nilai efisiensi masing-masing DMU, DEA juga menunjukkan rekomendasi unit untuk unit yang tidak efisien (Yuli, 2009). Berikut adalah beberapa asumsi yang terlibat dalam proses DEA beserta pro dan kontra dari metode DEA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengukuran Kinerja

Penelitian ini menggunakan alat analisis DEA dengan menggunakan software MaxDEA Lite 12, dimana perhitungannya menggunakan CRS yang berorientasi pada pendekatan output. Berdasarkan klasifikasinya, Decision Making Unit (DMU) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. Terdapat Lima Dinas Kota Tidore Kepulauan yang akan menjadi tempat penelitiannya dan untuk data yang diolah adalah data input terdiri dari Tanah, Perlaratan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi data lima tahun terakhir dari tahun 2019 – tahun 2023 kemudian Outputnya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah mulai dari tahun 2019 – tahun 2023. Untuk identifikasi data variabel yang digunakan. Variabel pada diatas adalah variabel output yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis DEA. Berdasarkan tabel 4.6 di bawah ini menerangkan mengenai data input dan output kinerja aset yang akan digunakan dalam

menganalisis DEA berorientasi Output dimana jika terjadi penambahan sebesar x input maka output yang dihasilkan akan bertambah sebesar x. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dari kinerja aset pada Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan pendekatan Output berorientasi DEA dengan mengukur hubungan antara input dengan beberapa output secara bersama-sama.

Menunjukkan skor efisiensi masing-masing aset SKPD di tahun 2019, dimana hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 4 dinas pada tahun 2019 yang memiliki skor efisiensi yang bernilai 1. Keempat Instansi tersebut yang memiliki kinerja pemanfaatan aset dapat dikatakan efisien yaitu tanah pada Dinkes, Instansi Pendidikan, Instansi Perkim dan Instansi Pertanian sementara perlaratan dan mesin pada Dinkes, Instansi Pendidikan, Instansi PU, Instansi PERKIM dan Instansi Pertanian, untuk gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian, sementara jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian. Untuk total aset Kota Tidore Kepulauan pada SKPD tahun 2019 yang dapat dikatakan kurang efisien yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum. Dikatakan kurang efisien karena kinerja total aset Kota Tidore Kepulauan pada SKPD tahun 2019 untuk angka hasil perhitungan *Technical Efficiency* DEA adalah 0.144 (14,4%) yang mana masih ada sisa 85,6% lagi untuk dapat mencapai angka 100% menjadi efisien. maka kinerja aset di SKPD Kota Tidore Kepulauan yang tersedia harus digunakan semaksimal dan seoptimal mungkin sesuai dengan aturan dan ketentuannya.

Tabel 1. Tabel Hasil Perhitungan *Technical Efficiency* DEA
Kinerja Pemanfaatan Aset Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020

Dinas	score	Tanah	Perlaratan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan Irigasi Dan Jaringan
Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1	1	1	1	1
Dinas PU	0.151658	1	1	1	-86907880320
Dinas PERKIM	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil olah data DEA

Tabel 4.8 menunjukkan skor efisiensi masing-masing aset SKPD di tahun 2020, dimana hasil pengelolaan menunjukkan bahwa terdapat 4 dinas pada tahun 2020 yang memiliki skor efisiensi yang bernilai 1. Keempat Instansi tersebut yang memiliki kinerja pemanfaatan aset dapat dikatakan efisien yaitu tanah pada DINKES, Instansi Pendidikan, Instansi PU,

Instansi Perkim dan Instansi Pertanian sementara perlaratan dan mesin pada DINKES, Instansi Pendidikan, Instansi PU, Instansi PERKIM dan Instansi Pertanian, untuk gedung dan bangunan pada DINKES, Instansi Pendidikan, Instansi PU, Instansi PERKIM dan Instansi Pertanian, sementara jalan irigasi dan jaringan pada DINKES, Instansi Pendidikan, Instansi PERKIM dan Instansi Pertanian. Untuk total aset Kota Tidore Kepulauan pada SKPD tahun 2020 yang dapat dikatakan kurang efisien yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum. Dikatakan kurang efisien karena kinerja total aset Kota Tidore Kepulauan pada Instansi Pekerjaan Umum tahun 2020 untuk angka hasil perhitungan *Technical Efficiency* DEA adalah 0.152 (15,2%) yang mana masih ada sisa 84,8% lagi untuk dapat mencapai angka 100% menjadi efisien. maka kinerja aset di SKPD Kota Tidore Kepulauan yang tersedia harus digunakan semaksimal dan seoptimal mungkin sesuai dengan aturan dan ketentuannya.

Tabel 2. Tabel Hasil Perhitungan *Technical Efficiency* DEA
Kinerja Pemanfaatan Aset Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021

Dinas	score	Tanah	Perlaratan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan Irigasi Dan Jaringan
Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1	1	1	1	1
Dinas PU	0.220635	1	1	-48244668737	-4.24837E+11
Dinas PERKIM	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil olah data DEA

Tabel 2 menunjukkan skor kecakapan untuk setiap aset SKPD pada tahun 2021, dimana hasil manajemen menunjukkan bahwa terdapat 4 instansi pada tahun 2021 dengan skor kecakapan 1. Dapat dikatakan bahwa keempat instansi yang memiliki kinerja penggunaan aset yang efektif yaitu tanah di Biro Kesehatan, Biro Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Birchem, Dinas Pertanian sedangkan Perlaratan dan mesin di Biro Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Birchem, Dinas Pertanian, untuk bangunan dan bangunan di Biro Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian, sedangkan jalan irigasi dan jaringan di Biro Kesehatan, Biro Pendidikan, Dinas PERKIM dan Dinas PERKIM dan Pertanian. Untuk total aset Kota Kepulauan Tidore di SKPD tahun 2021 yang bisa dibidang kurang efisien, itu adalah Dinas Pekerjaan Umum.

Dikatakan kurang efisien karena total kinerja aset kota Kepulauan Tedore di Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2021 untuk angka dari perhitungan kompetensi teknis DEA adalah 0,221 (22,1%), di mana masih tersisa 77,9% untuk dapat mencapai 100% untuk efektif.

Kinerja aset yang ada di SKPD Kota Kepulauan Tidore yang tersedia kemudian harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan optimal sesuai dengan aturan dan ketentuannya.

Tabel 3. Tabel Hasil Perhitungan *Technical Efficiency* DEA
Kinerja Pemanfaatan Aset Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022

Dinas	score	Tanah	Perlaratan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan Irigasi Dan Jaringan
Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1	1	1	1	1
Dinas PU	0.255444	1	1	-48244668737	-4.24837E+11
Dinas PERKIM	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil olah data DEA

Tabel 3 menunjukkan skor kecakapan masing-masing aset SKPD pada tahun 2022, dimana hasil manajemen menunjukkan bahwa terdapat 4 instansi pada tahun 2022 dengan skor kecakapan 1. Dapat dikatakan bahwa keempat instansi yang melakukan pemanfaatan aset tersebut efisien, yaitu tanah di Biro Kesehatan, Instansi Pendidikan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi PERKIM, dan Instansi Pertanian, sedangkan Perlaratan dan mesin di Biro Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Birchem, Dinas Pertanian, gedung dan bangunan di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Birchem, Dinas Pertanian, Dinas Pertanian, sedangkan jalan dan jaringan irigasi berada di Biro Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian. Untuk total aset Kota Kepulauan Tidore di SKPD tahun 2022 yang bisa dibilang kurang efisien, itu adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dikatakan kurang efisien karena kinerja total aset Kota Tidore Kepulauan pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2022 untuk angka hasil perhitungan *Technical Efficiency* DEA adalah 0.255 (25,5%) yang mana masih ada sisa 74,5% lagi untuk dapat mencapai angka 100% menjadi efisien. maka kinerja aset di SKPD Kota Tidore Kepulauan yang tersedia harus digunakan semaksimal dan seoptimal mungking sesuai dengan aturan dan ketentuannya.

Analisis Tingkat Inefisiensi Total Aset

Hasil pencapaian efisiensi Berdasarkan sampel yang dipilih, rata-rata kinerja keseluruhan pemanfaatan aset kota Kepulauan Tidore mencapai tingkat efisiensi dalam lima tahun terakhir SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian periode 2019-2023, sedangkan yang tidak mencapai tingkat efisiensi selama periode 2019-2023 yaitu Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai inefisiensi yang berbeda setiap tahunnya.

Selain membuat skor level yang efektif, ini juga menghasilkan informasi tentang proyeksi, gerakan proporsional, dan gerakan kendur. Proyeksi adalah nilai input yang harus digunakan atau diproduksi dalam kegiatan produksi DMU agar dapat bekerja secara efisien. Gerakan stagnasi adalah berkurangnya jumlah input di luar pergerakan rasio karena kelebihan input dan penambahan jumlah output. Gerakan proporsional adalah untuk mengurangi jumlah input sambil mempertahankannya

Tingkat inefisiensi berdasarkan masing-masing variabel input dan output dari Tanah, Perlaratan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan SKPD terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum.

SIMPULAN

Hasil perhitungan Output penggunaan Kinerja Pemanfaatan Aset Kota Tidore Kepulauan untuk hasil pengelolaan menunjukkan bahwa terdapat 4 dinas pada lima tahun terakhir yang memiliki skor efisiensi yang bernilai 1. Keempat Dinas tersebut yang memiliki kinerja pemanfaatan aset dapat dikatakan efisien yaitu tanah pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Perkim dan Dinas Pertanian sementara perlaratan dan mesin pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian, untuk gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian, sementara jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PERKIM dan Dinas Pertanian. Untuk total aset Kota Tidore Kepulauan pada SKPD yang dapat dikatakan kurang efisien yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum.

Selanjutnya peneliti memberikan saran terkait penggunaan aset di Kota Tidore Kepulauan memprioritaskan program dalam peningkatan aset agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah, saran lainya yang diberikan peneliti adalah untuk peneliti lain yang akan mengambil penelitian dengan kasus serupa terkait dengan Kinerja Pemanfaatan Aset adalah lebih mendalami lagi penelitiannya terkait dengan Kinerja pemanfaatan aset terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan alat analisis DEA maupun alat analisis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aira, A. (2014). The Role of Asset Management in Regional Development. *Journal of Socio-Religious Research*, Vol.17, 21–39.
- Binuko, A., Siregar, H., & Hartoyo, S. (2017). Application Of Data Envelopment Analysis To Examine The Cost Efficiency And Income Of The Company (Studyi Case Of Pt . Dian

SWARA). 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.17358/JABM.3.1.71>

bpk.go.id. (2016). Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property. Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>

bpkp.go.id. (2007). Regulation Of The Minister Of Home Affairs Number 17 Of 2007 Concerning Technical Guidelines For The Management Of Regional Property With The Grace Of God Almighty The Minister Of Home Affairs. Regulation Of The Minister of Home Affairs, 1–97. [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Permendagri No.17-2007.pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Permendagri%20No.17-2007.pdf)

Budisusilo. (2005). CHAPTER II Literature Review CHAPTER II LITERATURE REVIEW 2.1 Utilization of Regional Assets in Increasing Regional Original Income Theoretical Foundation. 1–64.

Goddess

djkn.kemenkeu.go.id. (2023). *Optimalkan Manajemen Aset di Provinsi Sulawesi Utara, DPD RI Provinsi Sulawesi Utara Mengunjungi Kanwil DJKN Suluttenggomalut*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut/baca-berita/32832/Optimalkan-Manajemen-Aset-di-Provinsi-Sulawesi-Utara-DPD-RI-Provinsi-Sulawesi-Utara-Mengunjungi-Kanwil-DJKN-Suluttenggomalut.html>

Feijar, & Priyono, B. (2023). Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 5(2), 71–82.

Hasan, M. H. (2012). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 5(2), 61–77. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.5.2.61-77>

Hidayat, T., Fitrianingrum, L., & Hudiwasono, K. (2021). Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian. *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung*, 42–50.

INDONESIA, P. P. R. (2021). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*. 069202, 25. [file:///C:/Users/acer/Favorites/Downloads/PP Nomor 10 Tahun 2021.pdf](file:///C:/Users/acer/Favorites/Downloads/PP%20Nomor%2010%20Tahun%202021.pdf)

Irawan, T. K. (2013). Analisis Pengaruh PAD, Investasi , Dan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010. In *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Negeri Semarang*.

- Jamaludin, J. (2019). Analisis Efisiensi Relatif Terhadap Pemanfaatan Aset Tetap Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Ntb). *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 2(2), 33. <https://doi.org/10.32493/skt.v2i2.2490>
- kemenkeu.go.id. (2014). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH*. Kemenkeu.Go.Id. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/27TAHUN2014PP.htm>
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410>
- Pauweni, S., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 50–61. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17172>
- Puspitasari, D., & Setyanta, B. (2020). Pengaruh tata kelola publik, pendapatan asli daerah dan total aset terhadap kinerja Pemerintah Daerah. *Al Tjjarah*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.21111/tjjarah.v6i1.3783>
- Riswati. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Di Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(1), 12–22.
- RPJMD. (2016). *RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2021-2026*. 1–14.
- Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. . K., & Anggiriawan, P. B. (2019). Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i1.145>
- Sari, R., Harlen, H., & Kornita, S. E. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Menara Ilmu*, 16(1), 121–134. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3575>
- SIMATUPANG, D. P. N. (2019). *Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang aset negara dengan mengaitkan pada UU Nomor 51 Prp Tahun 1960*. 1–112.
- siregar. (2005). *pemanfaatan aset dan landasan teori aset*. 15–59.
- Sugiama. (2013). *siklus aset dalam penelitian pemanfaatan aset dalam PAD bab II*. 15–59.
- Syahputra, O., Hutagalung, G., & Pakpahan, E. (2021). The Impact Of Local Taxes, Regional Retributions, and Other Legitimate Original Local Government Revenues On The Financial Performance Of Local Government With Economic Growth As A Moderating Variabele In The Government Of North Sumatera Province. *International*

Journal of Business, Economics and Law, 24(3), 107–115. www.djpk.kemenkeu.go.id

Tupa, johan M. (2013). DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) SEBAGAI METODE ALTERNATIF NILAI EFISIENSI PENGELOLAAN PROGRAM STUDI. *Jurnal Teknik Industri*. <https://media.neliti.com/media/publications/317342-data-envelopment-analysis-dea-sebagai-me-53d9a4b5.pdf>

unpas.ac.id. (2021). *TINJAUAN TEORI MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, TEORI PENGAWASAN, DAN TEORI TENTANG LEMBAGA NEGARA*. Unpas.Ac.Id. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.